

DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA TERHADAP KEBIJAKAN FOREST LAW ENFORCEMENT, GOVERNANCE, AND TRADE UNI EROPA DALAM PERDAGANGAN KAYU INDONESIA

Serli Anggraeni, Yasmin Khairunnisa Somantri, Ghina Arindiya, Nadisha Aida Salsabila, Muhammad Setiawan Ichsan

Program Studi Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia
Email: serli.44321020@mahasiswa.unikom.ac.id, yasmin.44321001@mahasiswa.unikom.ac.id,
ghina.44321008@mahasiswa.unikom.ac.id,
nadisha.44321027@mahasiswa.unikom.ac.id, setiawan.44319018@mahasiswa.unikom.ac.id

ABSTRAK

Diplomasi ekonomi Indonesia, melalui kebijakan Forest Law Enforcement, Governance, and Trade (FLEGT) dan sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), memainkan peran penting dalam meningkatkan perdagangan kayu legal, memperkuat posisi Indonesia di pasar global, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. FLEGT bertujuan untuk mengatasi perdagangan kayu ilegal dengan memastikan legalitas dan keberlanjutan kayu yang diperdagangkan, sementara SVLK berfungsi untuk memverifikasi legalitas kayu yang diekspor, khususnya ke Uni Eropa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran diplomasi ekonomi dalam implementasi FLEGT dan SVLK, serta dampaknya terhadap perdagangan kayu Indonesia, kesejahteraan ekonomi dan hubungan ekonomi dengan Uni Eropa.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FLEGT dan SVLK telah meningkatkan daya saing produk kayu Indonesia, membuka akses pasar yang lebih besar, dan memperbaiki citra Indonesia sebagai produsen kayu yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Meskipun ada tantangan dalam penegakan hukum dan pengawasan terhadap praktik perdagangan kayu ilegal, diplomasi ekonomi Indonesia berperan kunci dalam memperkuat hubungan internasional dan mendorong negara-negara lain untuk mengikuti jejak Indonesia dalam mengatasi masalah kayu ilegal.

Kata Kunci : Diplomasi Ekonomi, FLEGT, Perdagangan Kayu, Pengelolaan Hutan, SVLK, Uni Eropa.

PENDAHULUAN LATAR BELAKANG

Diplomasi ekonomi Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam politik luar negeri, terutama dalam konteks perdagangan kayu tropis. Sebagai salah satu produsen kayu tropis terbesar di dunia, Indonesia memiliki tantangan besar dalam mengatasi masalah perdagangan kayu ilegal yang berkontribusi terhadap deforestasi dan kerusakan lingkungan. Masalah ini tidak hanya berdampak pada Indonesia, tetapi juga pada pasar global yang semakin menuntut keberlanjutan dan transparansi dalam rantai pasokan kayu. Oleh karena itu, diplomasi ekonomi Indonesia harus mampu menanggapi isu ini dengan pendekatan yang tidak hanya melibatkan kebijakan domestik tetapi juga kerjasama internasional yang efektif.

Salah satu upaya yang diambil Indonesia untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan bergabung dalam mekanisme Forest Law Enforcement, Governance, and Trade (FLEGT), yang merupakan inisiatif yang digagas oleh Uni Eropa. FLEGT bertujuan untuk mengatasi perdagangan kayu ilegal dengan mengintegrasikan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK), yang memastikan bahwa kayu yang diperdagangkan memenuhi standar keberlanjutan dan legalitas. Dalam hal ini, Indonesia berkomitmen untuk menerapkan sistem ini, yang bertujuan untuk membangun sistem pengelolaan hutan yang lebih transparan dan berkelanjutan, serta mengurangi dampak negatif dari pembalakan liar yang merusak ekosistem hutan.

FLEGT bukan hanya tentang implementasi kebijakan domestik, tetapi juga tentang diplomasi ekonomi Indonesia di tingkat internasional. Dengan menerapkan sistem SVLK, Indonesia tidak hanya memperbaiki pengelolaan hutan dalam negeri, tetapi juga memperkuat posisi tawarnya di pasar global. Kerjasama dengan Uni Eropa dalam FLEGT memberikan akses yang lebih besar bagi produk kayu Indonesia ke pasar Eropa, yang dikenal memiliki regulasi ketat terhadap produk kayu ilegal. Hal ini membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor kayu legal yang memenuhi standar internasional, sekaligus memperbaiki citra negara sebagai produsen kayu yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Namun, tantangan besar tetap ada, terutama terkait dengan implementasi dan penegakan hukum yang konsisten terhadap kebijakan ini. Meskipun Indonesia telah berhasil menerbitkan lisensi FLEGT sebagai negara pertama yang berhasil mengimplementasikan sistem ini, ada banyak negara lain yang masih dalam proses negosiasi atau penerapan FLEGT. Dalam konteks ini, diplomasi ekonomi Indonesia memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya diterapkan di tingkat domestik, tetapi juga didorong secara aktif dalam kerangka kerja sama internasional. Diplomasi yang kuat diperlukan untuk mendorong negara-negara lain untuk mengikuti jejak Indonesia dalam mengatasi masalah kayu ilegal dan mendukung upaya keberlanjutan global.

Diplomasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi isu perdagangan kayu ilegal melalui mekanisme FLEGT menunjukkan bagaimana negara ini dapat menggunakan posisi tawar pasar kayu tropisnya untuk memperkuat hubungan internasional dan memajukan agenda keberlanjutan global. Dengan mengedepankan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan memperkenalkan sistem verifikasi legalitas kayu yang transparan, Indonesia tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar global, tetapi juga berkontribusi pada perlindungan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam. Keberhasilan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat diplomasi ekonomi dan memperluas akses pasar produk kayu legal Indonesia di dunia internasional. Diplomasi ekonomi Indonesia juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi negara melalui perdagangan kayu legal ke Uni Eropa, yang menjadi pasar utama bagi produk kayu Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana diplomasi ekonomi Indonesia dalam perdagangan kayu legal ke Uni Eropa berdampak pada perkembangan industri kayu nasional?
2. Apa kontribusi mekanisme Forest Law Enforcement, Governance, and Trade (FLEGT) dalam mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan

memperkuat posisi Indonesia dalam pasar kayu global, khususnya dalam memenuhi permintaan Uni Eropa terhadap produk kayu yang sah?

3. Bagaimana implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di Indonesia berkontribusi pada penguatan posisi Indonesia dalam perdagangan kayu internasional dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi Uni Eropa mengenai produk kayu yang legal?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis peran diplomasi ekonomi Indonesia dalam perdagangan kayu legal ke Uni Eropa serta dampaknya terhadap perkembangan industri kayu nasional.
2. Mengkaji kontribusi mekanisme Forest Law Enforcement, Governance, and Trade (FLEGT) dalam mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan di Indonesia dan memperkuat posisi Indonesia dalam pasar kayu internasional, khususnya untuk memenuhi permintaan Uni Eropa terhadap produk kayu legal.
3. Menilai implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di Indonesia dan dampaknya terhadap penguatan posisi Indonesia di pasar kayu internasional, serta kontribusinya dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi Uni Eropa terkait produk kayu yang sah.

TINJAUAN TEORITIS

1. Teori Diplomasi Ekonomi

Diplomasi ekonomi adalah cabang diplomasi yang bertujuan untuk meningkatkan kepentingan ekonomi nasional melalui hubungan internasional. Diplomasi ini melibatkan interaksi antara negara-negara untuk mempromosikan perdagangan, investasi, dan pembangunan ekonomi. Menurut Bayne dan Woolcock (2011), diplomasi ekonomi mencakup tiga elemen utama:

1. Promosi Ekonomi: Upaya memperluas akses pasar ekspor, meningkatkan daya saing produk domestik, dan menarik investasi asing.
2. Kerjasama Ekonomi Internasional: Negosiasi perjanjian perdagangan dan pembangunan bersama yang mendukung kepentingan ekonomi nasional.
3. Manajemen Krisis Ekonomi Global: Respons terhadap tantangan global seperti krisis finansial, perubahan iklim, atau isu lingkungan yang berdampak pada ekonomi.

Dalam konteks politik luar negeri, diplomasi ekonomi tidak hanya menjadi alat untuk mencapai tujuan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana memperkuat hubungan internasional. Hal ini termasuk dalam kasus perdagangan kayu tropis, di mana Indonesia menggunakan diplomasi ekonomi untuk menangani isu perdagangan kayu ilegal yang merugikan lingkungan dan ekonomi global.

2. Konsep Forest Law Enforcement, Governance, and Trade (FLEGT)

FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance, and Trade) adalah inisiatif yang diluncurkan oleh Uni Eropa pada tahun 2003 untuk mengatasi perdagangan kayu ilegal dan mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan. Salah satu tujuan utamanya adalah memastikan bahwa kayu yang diperdagangkan berasal dari sumber legal dengan memperkuat sistem hukum dan tata kelola di negara penghasil kayu. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi pembalakan liar dan memberikan dasar hukum yang kuat bagi perdagangan kayu yang sah.

Selain itu, FLEGT berfokus pada peningkatan tata kelola hutan yang baik melalui transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan hutan. Dengan melibatkan berbagai pihak, inisiatif ini mendorong pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab, sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat lokal.

FLEGT juga mendorong perdagangan kayu legal melalui sistem lisensi dan verifikasi, seperti Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Sistem ini memastikan bahwa produk kayu yang diekspor ke Uni Eropa memenuhi standar legalitas dan keberlanjutan. Dengan demikian, inisiatif FLEGT tidak hanya membantu melindungi hutan global tetapi juga menciptakan peluang pasar yang lebih luas bagi negara-negara penghasil kayu yang mematuhi standar tersebut.

FLEGT bertujuan menciptakan pasar global yang bebas dari kayu ilegal, mendukung konservasi hutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya hutan. Sebagai negara pertama yang berhasil menerbitkan lisensi FLEGT, Indonesia memanfaatkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sebagai instrumen utama untuk memastikan bahwa produk kayu yang diekspor memenuhi standar legalitas dan keberlanjutan. Langkah ini menjadikan Indonesia sebagai pelopor dalam penerapan tata kelola hutan yang bertanggung jawab di tingkat internasional.

Implementasi SVLK mencakup beberapa langkah strategis. Pertama, penerapan sistem ini melibatkan audit independen terhadap seluruh rantai pasokan kayu, mulai dari penebangan hingga ekspor, untuk memastikan transparansi dan legalitas. Kedua, kolaborasi multi-stakeholder antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil menjadi kunci dalam mendukung tata kelola hutan yang transparan. Ketiga, penguatan kapasitas lokal dilakukan melalui pelatihan dan edukasi bagi pemangku kepentingan, sehingga mereka memiliki pemahaman dan kemampuan untuk mengelola hutan secara berkelanjutan.

Dengan menerapkan SVLK, Indonesia tidak hanya memenuhi standar pasar Uni Eropa tetapi juga memperkuat posisi tawarnya di pasar global melalui diplomasi ekonomi. Implementasi ini mendukung keberlanjutan lingkungan, mendorong perdagangan kayu legal, dan meningkatkan citra Indonesia sebagai negara yang berkomitmen pada pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

3. Teori Ekonomi Internasional

Perdagangan internasional adalah aktivitas pertukaran barang dan jasa antara negara-negara yang berbeda. Menurut teori keunggulan komparatif David Ricardo, perdagangan internasional terjadi karena perbedaan keunggulan relatif yang dimiliki oleh masing-masing negara, yang memungkinkan mereka untuk mengkhususkan diri dalam produksi

barang atau jasa tertentu. Dalam konteks kayu tropis, Indonesia memiliki keunggulan komparatif sebagai salah satu produsen kayu tropis terbesar di dunia.

Akses pasar mengacu pada sejauh mana suatu negara atau perusahaan dapat menjual produknya ke pasar luar negeri, yang sangat dipengaruhi oleh regulasi perdagangan, perjanjian internasional, dan hambatan non-tarif. Misalnya, standar keberlanjutan dan legalitas kayu yang ditetapkan melalui mekanisme seperti FLEGT menjadi faktor penting. Selain itu, perjanjian perdagangan seperti kerjasama Indonesia-Uni Eropa melalui FLEGT memberikan kemudahan akses pasar bagi produk kayu Indonesia. Hambatan non-tarif, seperti persyaratan teknis dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), memastikan bahwa produk kayu memenuhi standar pasar global. Akses pasar yang baik ini membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor kayu legal sekaligus memperkuat citra positif di pasar internasional.

Regulasi yang diterapkan secara efektif dapat menjadi alat kompetitif yang meningkatkan daya saing produk di pasar internasional. Indonesia, misalnya, menggunakan SVLK untuk memastikan bahwa kayu yang diekspor memiliki legalitas yang jelas dan memenuhi standar keberlanjutan. Regulasi ini memberikan kepastian hukum yang meningkatkan kepercayaan pembeli internasional terhadap produk kayu Indonesia, memastikan konsistensi kualitas produk, dan memperkuat citra positif Indonesia sebagai produsen kayu yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan demikian, regulasi tidak hanya melindungi sumber daya alam tetapi juga memberikan keunggulan kompetitif di pasar global.

Teori Porter tentang keunggulan kompetitif menyatakan bahwa daya saing suatu negara di pasar internasional bergantung pada kemampuan industrinya untuk berinovasi dan memenuhi kebutuhan pasar global. Regulasi seperti FLEGT dan SVLK memungkinkan Indonesia untuk memasuki pasar baru, seperti Uni Eropa, yang memiliki standar ketat terhadap produk kayu ilegal. Selain itu, sertifikasi SVLK memberikan nilai tambah pada produk kayu Indonesia, menjadikannya lebih menarik di pasar global. Regulasi ini juga mendorong sektor kehutanan untuk mengadopsi praktik pengelolaan hutan yang lebih modern, inovatif, dan berkelanjutan, sehingga meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat internasional.

Regulasi seperti SVLK tidak hanya mendukung daya saing tetapi juga menciptakan manfaat jangka panjang dalam aspek keberlanjutan. Dari sisi lingkungan, regulasi ini mencegah deforestasi dan kerusakan hutan akibat pembalakan liar. Keberlanjutan sosial juga terwujud melalui manfaat ekonomi yang diberikan kepada masyarakat lokal yang terlibat dalam rantai pasokan kayu legal. Selain itu, keberlanjutan ekonomi dapat dicapai dengan meningkatkan pendapatan dari perdagangan kayu yang sah serta memperluas lapangan kerja di sektor kehutanan dan industri terkait.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakup berbagai sumber, terutama buku dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik terkait, kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang relevan dalam kajian diplomasi ekonomi dan perdagangan internasional. Data yang berhasil dikumpulkan akan dianalisis secara menyeluruh dan mendalam untuk memahami dinamika diplomasi ekonomi Indonesia, khususnya dalam konteks implementasi Forest Law Enforcement, Governance, and Trade (FLEGT) dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan perdagangan kayu Indonesia ke Uni Eropa.

Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang ada, dengan fokus pada fenomena diplomasi ekonomi dan kebijakan perdagangan internasional. Penelitian ini akan menggunakan data dari berbagai sumber resmi, seperti situs pemerintah Indonesia, Uni Eropa, serta dokumen kebijakan terkait, yang akan dianalisis dengan teori-teori dalam kajian hubungan internasional dan diplomasi ekonomi. Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi yang relevan dan akurat mengenai implementasi FLEGT, serta dampaknya terhadap perdagangan kayu Indonesia dan hubungan ekonomi Indonesia dengan Uni Eropa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Diplomasi Ekonomi Indonesia Terhadap Perkembangan Industri Kayu Nasional

Diplomasi ekonomi Indonesia memainkan peran strategis dalam mendorong perkembangan industri kayu nasional melalui perluasan akses pasar global, khususnya di Uni Eropa. Sebagai salah satu produsen kayu terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan daya saing dan nilai ekspor produk kayu legal yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, kebijakan *Forest Law Enforcement, Governance, and Trade* (FLEGT) menjadi instrumen penting dalam mendukung industri kayu nasional, dengan memastikan legalitas produk serta meningkatkan kepercayaan pasar internasional. FLEGT selaras dengan kebijakan Uni Eropa yang menekankan aspek keberlanjutan dan pencegahan perdagangan kayu ilegal, sehingga memperkuat posisi Indonesia sebagai eksportir utama produk kayu yang sah dan ramah lingkungan. Melalui diplomasi ekonomi yang efektif, Indonesia tidak hanya memperluas pasar bagi industri kayu nasional tetapi juga mendorong praktik kehutanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Melalui diplomasi ekonomi, Indonesia mampu mempromosikan keberlanjutan sektor kehutanan serta memperkuat posisinya di pasar global, khususnya dengan Uni Eropa sebagai salah satu mitra dagang utama. Diplomasi ekonomi ini mencakup perundingan perdagangan, penyusunan kebijakan, serta kerjasama internasional yang bertujuan untuk menciptakan pasar yang adil bagi produk kayu Indonesia yang sah dan berkelanjutan. Di sinilah peran penting pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung perdagangan kayu legal, serta diplomasi yang memastikan produk kayu Indonesia memenuhi standar yang ditetapkan oleh Uni Eropa (Parker & Reeve, 2016).

- **Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia**

Strategi diplomasi ekonomi Indonesia untuk memperjuangkan akses pasar Uni Eropa bagi produk kayu legal sangat berfokus pada penguatan hubungan bilateral dengan negara-negara Uni Eropa serta implementasi sistem verifikasi legalitas kayu, seperti yang tertuang dalam perjanjian FLEGT-VPA (Voluntary Partnership Agreement). Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terus berupaya untuk menjalin kerjasama dengan Uni Eropa untuk memperkenalkan mekanisme verifikasi produk kayu yang sah. Dalam konteks ini, diplomasi ekonomi Indonesia berperan sebagai penghubung antara sektor swasta dan pemerintah, memastikan bahwa kebijakan yang diambil berfokus pada kepatuhan terhadap peraturan Uni Eropa dan menciptakan iklim yang mendukung ekspor kayu legal.

Selain itu, Indonesia juga aktif memanfaatkan forum internasional, seperti Forum Kerjasama Ekonomi Asia Timur (EAS) dan ASEAN-EU Dialogue, untuk mempromosikan kebijakan FLEGT dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Dengan membangun hubungan sister city dan kerja sama yang lebih erat antara pemerintah daerah dan industri, Indonesia dapat meningkatkan kapasitas produksi kayu legal serta membuka lebih banyak peluang ekspor ke Uni Eropa (Kementerian Perdagangan RI, 2019).

- **Peningkatan Ekspor Kayu Legal**

Diplomasi ekonomi Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan ekspor kayu legal ke Uni Eropa. Melalui kebijakan FLEGT dan sistem V-Legal yang diterapkan, produk kayu Indonesia kini dapat memasuki pasar Uni Eropa dengan jaminan bahwa produk tersebut berasal dari sumber yang sah dan dikelola secara berkelanjutan. Sistem ini memberikan keuntungan kompetitif, di mana Uni Eropa lebih memilih produk kayu yang memenuhi kriteria keberlanjutan dan legalitas.

Peningkatan ekspor kayu legal ke Uni Eropa tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara, tetapi juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja, terutama di sektor kehutanan, industri pengolahan kayu, dan sektor terkait lainnya. Dengan memperkuat sektor kehutanan yang berkelanjutan, Indonesia juga turut berkontribusi terhadap penciptaan ekonomi hijau yang berfokus pada keberlanjutan sumber daya alam. Keberlanjutan sektor kehutanan juga membuka peluang untuk mengembangkan ekonomi kreatif, seperti industri produk kayu olahan, yang dapat memberikan nilai tambah lebih tinggi dan menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat Indonesia (GIZ, 2020).

Namun, tantangan terbesar dalam meningkatkan ekspor kayu legal adalah memastikan bahwa seluruh rantai pasokan kayu di Indonesia memenuhi persyaratan legalitas dan keberlanjutan yang ditetapkan oleh Uni Eropa. Dalam hal ini, diplomasi ekonomi Indonesia harus berperan dalam memperkuat kapasitas pengawasan dan kontrol terhadap praktik-praktik ilegal dalam industri kayu.

- **Tantangan Perdagangan Kayu Ilegal**

Meskipun Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan FLEGT, tantangan terbesar yang dihadapi dalam perdagangan kayu adalah perdagangan kayu ilegal. Praktik pembalakan liar dan pemanfaatan hutan secara ilegal masih menjadi masalah yang signifikan. Diplomasinya di tingkat internasional, dalam hal ini, harus melibatkan upaya untuk memerangi perdagangan kayu ilegal melalui perjanjian perdagangan yang adil dan transparan.

Diplomasi ekonomi dapat berperan penting dalam mempromosikan kebijakan untuk mengatasi masalah ini, seperti penguatan mekanisme pengawasan dan pelaksanaan hukum yang lebih ketat. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah memperkuat kerjasama antara pemerintah Indonesia dan negara-negara mitra dagang untuk memonitor dan mengidentifikasi jalur perdagangan kayu ilegal. Diplomasi ekonomi yang kuat akan membantu Indonesia memperoleh dukungan dari negara-negara Uni Eropa dalam

pemberantasan perdagangan kayu ilegal, serta memfasilitasi pengembangan kebijakan yang mengutamakan legalitas dalam perdagangan kayu (UNODC, 2017).

Selain itu, dengan adanya kebijakan yang mendukung keberlanjutan dan pengelolaan hutan yang baik, Indonesia dapat menurunkan insiden pembalakan liar, sehingga memperkuat reputasi sebagai produsen kayu yang sah dan berkelanjutan. Oleh karena itu, peran diplomasi ekonomi Indonesia sangat penting untuk memastikan bahwa perdagangan kayu yang sah dapat berlangsung dengan lebih efisien dan transparan.

Kontribusi Forest Law Enforcement, Governance, and Trade (FLEGT) dalam Mendorong Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan

• Implementasi FLEGT di Indonesia

Indonesia sebagai salah satu negara penghasil kayu terbesar di dunia, memiliki tantangan besar dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Dalam rangka meningkatkan kualitas ekspor kayu ke pasar global, terutama Uni Eropa, Indonesia telah mengimplementasikan mekanisme Forest Law Enforcement, Governance, and Trade (FLEGT). FLEGT adalah suatu kerangka kerja yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk kayu yang diekspor berasal dari sumber yang sah dan dikelola dengan cara yang berkelanjutan (EIA, 2018).

FLEGT di Indonesia berfokus pada verifikasi legalitas kayu dan produk kayu melalui sistem V-Legal, yang memastikan bahwa kayu yang diproduksi berasal dari sumber yang sah dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh Uni Eropa. Proses verifikasi ini didukung oleh kerjasama antara pemerintah Indonesia, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat kapasitas pengawasan serta menanggulangi pembalakan liar (GIZ, 2020). Melalui implementasi FLEGT, Indonesia dapat memperbaiki transparansi dan akuntabilitas dalam sektor kehutanan, serta memperbaiki citra produk kayu Indonesia di pasar internasional, khususnya Uni Eropa.

• Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan

FLEGT berkontribusi secara signifikan dalam mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan di Indonesia. Salah satu aspek penting dari FLEGT adalah pengurangan pembalakan liar, yang menjadi salah satu penyebab utama kerusakan hutan di Indonesia. Dengan adanya mekanisme FLEGT, pemerintah Indonesia dapat melaksanakan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik-praktik ilegal, serta mendorong pengusaha kayu untuk beralih pada praktik yang lebih ramah lingkungan dan sah secara hukum (UNODC, 2017).

Reformasi kebijakan kehutanan yang diterapkan di Indonesia juga memperkuat pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta kebijakan lainnya yang terkait dengan pelestarian hutan, sejalan dengan tujuan FLEGT dalam meningkatkan tata kelola hutan yang lebih baik. Selain itu, perlindungan terhadap ekosistem hutan menjadi prioritas, di mana keberagaman hayati serta pengelolaan yang berbasis masyarakat menjadi faktor utama yang diperkuat dalam implementasi FLEGT.

Sebagai contoh, inisiatif Program Restorasi Ekosistem (PRK) yang digagas oleh pemerintah Indonesia bertujuan untuk mengembalikan kawasan hutan yang rusak dan memastikan bahwa kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat berorientasi pada keberlanjutan (AIPT, 2021). Semua langkah ini semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen kayu yang berkelanjutan dan memenuhi standar internasional.

- **Posisi Indonesia dalam Pasar Kayu Global**

Implementasi FLEGT juga berperan penting dalam memperkuat posisi Indonesia dalam pasar kayu global, khususnya di Uni Eropa. Seiring dengan penerapan sistem verifikasi legalitas kayu (V-Legal) dan sertifikasi produk kayu yang sah, Indonesia dapat menawarkan produk kayu yang memenuhi permintaan pasar Uni Eropa, yang sangat ketat terhadap legalitas dan keberlanjutan produk kayu.

Melalui mekanisme FLEGT, Indonesia tidak hanya memastikan bahwa kayu yang diekspor ke Uni Eropa sah, tetapi juga memiliki nilai tambah karena berasal dari praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Hal ini memberi keuntungan kompetitif bagi Indonesia di pasar internasional, serta membuka peluang untuk meningkatkan ekspor kayu dan produk kayu, yang pada gilirannya dapat mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor kehutanan.

Peningkatan daya saing produk kayu Indonesia di pasar global ini juga berhubungan dengan program diplomasi ekonomi Indonesia. Kerja sama internasional melalui berbagai forum seperti Forum Kerjasama Ekonomi Asia Timur (EAS) dan ASEAN, serta penguatan hubungan dengan negara-negara Uni Eropa, memperlihatkan bagaimana diplomasi ekonomi dapat memfasilitasi peningkatan ekspor kayu Indonesia (Kementerian Perdagangan RI, 2019). Diplomasi ekonomi juga berperan dalam memperkenalkan inovasi dan ekonomi kreatif berbasis produk kayu, yang dapat meningkatkan nilai tambah serta daya tarik pasar

Implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan Kontribusinya terhadap Kepatuhan terhadap Regulasi Uni Eropa

- **Peran SVLK dalam Memastikan Legalitas Kayu**

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) adalah mekanisme yang diterapkan di Indonesia untuk memastikan bahwa kayu dan produk turunannya yang dihasilkan, diperdagangkan, hingga diekspor memiliki status legalitas yang terjamin. Sistem ini dirancang sebagai alat pengawasan dan pengendalian untuk mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan, memerangi pembalakan liar, dan mewujudkan tata kelola hutan yang baik (good forest governance).

Legalitas kayu diterapkan di Indonesia untuk memastikan bahwa seluruh produk kayu yang beredar dan diperdagangkan di dalam negeri memiliki status legalitas yang jelas. Dengan adanya sistem ini, konsumen internasional tidak perlu meragukan keabsahan kayu yang berasal dari Indonesia. Pengelola unit hutan dapat merasa yakin bahwa hasil kayunya tidak diragukan legalitasnya, sementara industri berbasis kayu juga dapat lebih percaya diri terhadap sumber bahan baku legal yang mereka gunakan, sehingga lebih mudah meyakinkan pembeli di pasar luar negeri.

Melalui SVLK, setiap tahap dalam rantai produksi kayu, mulai dari penebangan, pengangkutan, pengolahan, hingga distribusi, diawasi secara ketat agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, SVLK juga menjawab kebutuhan pasar internasional yang semakin menuntut produk kayu bersertifikasi legal, terutama dari negara-negara seperti Uni Eropa. Dengan penerapan SVLK, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk menjamin legalitas produk kayu sekaligus meningkatkan daya saingnya di pasar global.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal, sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola hutan yang baik menuju pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Selain itu, permintaan dari pasar internasional, khususnya Uni Eropa, untuk jaminan legalitas kayu melalui sertifikasi menjadi faktor pendorong penting. Sebagai bentuk respons terhadap meningkatnya kebutuhan akan skema sertifikasi legalitas kayu dari negara asing, seperti FSC dan PEFC, sistem ini juga dapat dianggap sebagai insentif nasional untuk mendukung perdagangan kayu yang sah.

- **Penguatan Posisi Indonesia dalam Perdagangan Kayu Internasional**

Komitmen Indonesia dalam mendukung pertumbuhan produk kehutanan yang legal dan berkelanjutan diwujudkan melalui Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), yang mulai dirintis sejak tahun 2001.

Penerapan SVLK memberikan berbagai manfaat, seperti meningkatkan kepercayaan pasar, membuka akses ke pasar internasional, mengurangi kerusakan hutan, mendukung tata kelola hutan yang lebih baik, dan memberikan jaminan kepada mitra dagang mengenai keterlacakan bahan baku dari sumber legal dan berkelanjutan. Pencapaian SVLK terlihat dari peningkatan nilai ekspor produk kayu sebesar 91,7% dalam periode 2013 hingga 2019.

Tantangan ke depan mencakup promosi SVLK sebagai instrumen pelestarian hutan, penguatan pasar domestik untuk produk kayu bersertifikat, pengembangan aplikasi seperti ITX dan BVRio, pemberian insentif bagi pengelola hutan dan masyarakat yang bermitra, serta upaya menjajaki sinergi antara SVLK dengan sistem sertifikasi lainnya.

- **Kepatuhan terhadap Regulasi Uni Eropa**

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) berperan penting dalam membantu Indonesia mematuhi regulasi Uni Eropa yang melarang perdagangan kayu ilegal, khususnya melalui implementasi European Union Timber Regulation (EUTR). Regulasi ini mewajibkan semua produk kayu yang masuk ke pasar Uni Eropa memiliki jaminan legalitas dan berasal dari sumber yang berkelanjutan. Dengan SVLK, Indonesia memberikan bukti kepatuhan terhadap standar legalitas kayu, sehingga ekspor produk kayu ke Uni Eropa dapat berjalan tanpa hambatan.

Sertifikasi SVLK diterima sebagai dokumen legalitas yang diakui Uni Eropa melalui FLEGT-VPA (Forest Law Enforcement, Governance and Trade – Voluntary Partnership Agreement) yang mulai berlaku penuh sejak 2016. Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang berhasil menerbitkan lisensi FLEGT, yang memberikan

keuntungan signifikan karena produk kayu bersertifikat SVLK otomatis dianggap mematuhi EUTR, tanpa perlu pemeriksaan tambahan di negara tujuan.

Adapun dampak terhadap Hubungan Perdagangan Indonesia-Uni Eropa :

1. Peningkatan Kepercayaan Pasar

Dengan SVLK, produk kayu Indonesia mendapatkan reputasi yang lebih baik di pasar Uni Eropa. Sertifikasi ini memperkuat kepercayaan konsumen terhadap legalitas dan keberlanjutan produk kayu asal Indonesia, sehingga meningkatkan daya saing di pasar global.

2. Akses Pasar yang Lebih Luas

Melalui SVLK dan lisensi FLEGT, produk kayu Indonesia memiliki keunggulan kompetitif di pasar Uni Eropa. Hal ini menciptakan peluang untuk meningkatkan ekspor kayu dan produk turunannya ke negara-negara anggota Uni Eropa.

3. Peningkatan Nilai Ekspor

SVLK telah berkontribusi pada pertumbuhan nilai ekspor produk kayu Indonesia. Dalam periode 2013–2019, nilai ekspor produk kayu meningkat signifikan sebesar 91,7%, sebagian besar berkat pengakuan dari pasar internasional, termasuk Uni Eropa.

4. Penguatan Komitmen terhadap Keberlanjutan

Implementasi SVLK memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang berkomitmen pada keberlanjutan dan tata kelola hutan yang baik. Ini berdampak positif pada hubungan diplomatik dan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa, terutama dalam isu-isu lingkungan global.

5. Tantangan dan Peluang

Meskipun SVLK telah memberikan banyak manfaat, tantangan tetap ada, termasuk memastikan pelaksanaan SVLK di seluruh rantai pasok, mempromosikan produk bersertifikat SVLK secara lebih luas, dan menghadapi persaingan dari negara lain yang juga berupaya memenuhi regulasi Uni Eropa. Di sisi lain, peluang untuk memperluas pasar dan meningkatkan nilai ekspor tetap besar dengan terus memperkuat implementasi SVLK.

SVLK bukan hanya alat untuk memenuhi regulasi Uni Eropa tetapi juga instrumen strategis untuk memperkuat hubungan perdagangan dan diplomasi antara Indonesia dan Uni Eropa.

• **Sinergi antara Diplomasi Ekonomi, FLEGT, dan SVLK dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Indonesia**

Diplomasi ekonomi Indonesia, Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT), dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) bekerja secara sinergis untuk mendukung tujuan bersama: meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasional melalui

perdagangan kayu yang legal, berkelanjutan, dan kompetitif di pasar internasional. Sinergi ini tercapai melalui peran masing-masing komponen yang saling melengkapi.

Sinergi antara diplomasi ekonomi, FLEGT, dan SVLK menghasilkan dampak positif yang nyata bagi perekonomian Indonesia:

1. **Peningkatan nilai ekspor** : Implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan pengakuan lisensi Forest Law Enforcement, Governance, and Trade (FLEGT) telah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan nilai ekspor produk kayu Indonesia. Sejak diwajibkannya SVLK pada tahun 2013, nilai ekspor produk kayu Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa nilai ekspor produk kayu Indonesia mencapai **US\$6,05 miliar pada tahun 2013** dan meningkat menjadi **US\$12,3 miliar pada tahun 2018**. Hingga 18 November 2019, total nilai ekspor produk kayu mencapai **US\$65 miliar**, dengan rata-rata peningkatan sekitar **10% per tahun**. Peningkatan ini terus berlanjut setelah tahun 2021. Menurut data yang diolah oleh Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) per 18 Januari 2023, **pada tahun 2021, ekspor produk kayu Indonesia mencapai US\$13,5 miliar**, menandai nilai ekspor tertinggi sepanjang sejarah hingga saat itu. Angka ini kembali meningkat pada **tahun 2022 menjadi US\$14,51 miliar**, mencatat rekor baru dengan kenaikan sekitar **7% dibandingkan tahun sebelumnya**. Selain itu, implementasi SVLK juga berperan dalam menurunkan proporsi kayu ilegal di Indonesia. Sebelum penerapan SVLK, proporsi kayu ilegal mencapai **80%**, namun menurun menjadi **29,1% pada tahun 2019**. Dengan meningkatnya nilai ekspor dan penurunan perdagangan kayu ilegal, industri kayu Indonesia semakin diperkuat melalui kebijakan perdagangan yang berkelanjutan. Diplomasi ekonomi yang efektif tidak hanya memperkuat posisi Indonesia sebagai eksportir utama produk kayu legal, tetapi juga membuka peluang ekspansi ke pasar global lainnya.
2. **Penciptaan lapangan kerja** : Industri berbasis kayu yang legal dan berkelanjutan memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, terutama di daerah pedesaan. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada kuartal pertama dan kedua tahun 2021, produksi kayu bulat dari hutan alam dan hutan tanaman mencapai 25.620.686 meter kubik, meningkat 5,97% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan produksi ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat pedesaan yang terlibat dalam berbagai aktivitas terkait, seperti penanaman, pemanenan, dan pengolahan kayu. Selain itu, Kementerian Perindustrian menekankan bahwa hilirisasi produk hasil hutan mampu membuka lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan ekspor, dan menghasilkan devisa bagi negara. Dengan demikian, pengelolaan hutan yang berkelanjutan tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja.
3. **Diversifikasi pasar** : Dengan memanfaatkan diplomasi ekonomi, Indonesia tidak hanya memperkuat hubungan dagang dengan Uni Eropa tetapi juga membuka peluang di pasar global lainnya. Kebijakan *Forest Law Enforcement, Governance,*

and Trade (FLEGT) dan implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) telah meningkatkan kepercayaan dunia terhadap produk kayu Indonesia, sehingga memperluas akses ke berbagai negara yang menerapkan standar ketat terhadap keberlanjutan dan legalitas kayu. Selain Uni Eropa, negara-negara seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Australia juga menunjukkan minat yang lebih besar terhadap produk kayu Indonesia yang telah tersertifikasi.

4. **Pengelolaan hutan yang berkelanjutan** : Tata kelola hutan yang baik melalui SVLK dan FLEGT membantu menjaga keberlanjutan sumber daya alam, yang menjadi aset ekonomi jangka panjang. Melalui kedua kebijakan ini, Indonesia memastikan bahwa setiap proses pengelolaan hutan dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab, yang tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan tetapi juga meningkatkan daya saing produk kayu Indonesia di pasar internasional. Implementasi SVLK memastikan bahwa hanya kayu yang berasal dari hutan yang dikelola secara legal dan berkelanjutan yang dapat diperdagangkan, sementara FLEGT memberikan pengakuan internasional terhadap legalitas kayu Indonesia, yang membuka akses ke pasar Uni Eropa yang sangat selektif. Sebagai hasilnya, sektor kehutanan Indonesia dapat terus berkontribusi pada perekonomian negara, menciptakan lapangan kerja, dan menghasilkan pendapatan negara melalui ekspor produk kayu yang sah. Dengan begitu, pengelolaan hutan yang berkelanjutan tidak hanya melindungi ekosistem tetapi juga berfungsi sebagai fondasi untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

- **Keberhasilan dan Tantangan Implementasi**

Indonesia berhasil mengimplementasikan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sebagai upaya menjamin legalitas dan keberlanjutan produk kayu yang diperdagangkan. Sistem ini wajib diterapkan untuk meningkatkan pengelolaan hutan dan memperkuat kredibilitas kayu Indonesia.

- **Keberhasilan Implementasi SVLK**

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) telah menunjukkan keberhasilan signifikan dalam mendukung perdagangan kayu legal Indonesia. Salah satu pencapaiannya adalah pengakuan internasional, terutama oleh Uni Eropa, sebagai sistem legalitas kayu pertama yang sesuai dengan standar FLEGT. Pengakuan ini meningkatkan kepercayaan pasar global terhadap produk kayu Indonesia. Selain itu, SVLK memberikan akses pasar yang luas, memungkinkan produk kayu Indonesia masuk ke 28 negara Uni Eropa tanpa memerlukan uji tuntas tambahan, yang secara langsung meningkatkan peluang ekspor. Implementasi SVLK juga berkontribusi pada pertumbuhan nilai ekspor produk kayu secara signifikan sejak sistem ini diterapkan.

Meskipun berhasil, terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk menjaga keberlanjutan sistem ini. Salah satunya adalah penyesuaian terhadap regulasi internasional baru, seperti European Union Deforestation-free Regulation (EUDR), yang dapat memengaruhi akses pasar Indonesia. Selain itu, konsistensi implementasi SVLK menjadi perhatian penting,

mengingat diperlukan pengawasan ketat untuk memastikan seluruh pelaku industri mematuhi standar yang telah ditetapkan. Tantangan lainnya adalah meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya usaha kecil, agar mampu menerapkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan sesuai dengan standar internasional.

Indonesia juga menghadapi tantangan dalam meningkatkan daya saing produknya di tengah kompetisi global. Negara-negara lain yang juga memproduksi kayu legal terus berupaya memperluas pangsa pasar mereka, sehingga Indonesia perlu berinovasi untuk mempertahankan posisinya. Strategi peningkatan daya saing dapat dilakukan dengan memperkuat kualitas produk, memperluas diversifikasi pasar, serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan dalam rantai pasokan kayu.

Dengan mengatasi tantangan ini melalui diplomasi ekonomi yang efektif dan langkah strategis, Indonesia dapat memperkuat pengelolaan hutan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Diplomasi ekonomi dapat dimanfaatkan untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara mitra, mempromosikan keunggulan SVLK, dan memastikan bahwa regulasi internasional baru tidak menjadi hambatan bagi ekspor kayu Indonesia. Langkah ini tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin global dalam perdagangan kayu legal.

- **Dampak terhadap Perekonomian Indonesia**

Kebijakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Salah satu kontribusi utamanya adalah peningkatan sektor kehutanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Melalui sistem ini, ekspor produk kayu legal Indonesia meningkat secara signifikan, yang tidak hanya memperkuat pendapatan negara tetapi juga menciptakan stabilitas dalam perdagangan internasional. Dengan pengakuan internasional yang diperoleh SVLK, produk kayu Indonesia mendapatkan kepercayaan yang lebih besar di pasar global, sehingga memperluas peluang ekspor.

Selain kontribusi terhadap PDB, SVLK juga berdampak pada penciptaan lapangan kerja di sektor kehutanan, industri pengolahan kayu, dan sektor terkait lainnya. Sistem ini mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan, sehingga menciptakan peluang ekonomi jangka panjang bagi masyarakat lokal, termasuk pelaku usaha kecil. Dengan adanya pelatihan dan pendampingan, SVLK juga membantu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor kehutanan, memperkuat daya saing produk kayu Indonesia di pasar global.

Untuk terus mendukung pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan, implementasi SVLK perlu diperkuat dengan mengatasi berbagai tantangan yang ada, seperti konsistensi penerapan di seluruh wilayah dan penyesuaian terhadap regulasi internasional baru. Selain itu, mendorong pengakuan internasional yang lebih luas terhadap SVLK akan semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin dalam perdagangan kayu legal yang berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, SVLK tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga menjadi fondasi bagi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial di Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Diplomasi ekonomi Indonesia berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui perdagangan kayu legal ke Uni Eropa. Melalui kebijakan *Forest Law Enforcement, Governance, and Trade (FLEGT)* serta sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), Indonesia berhasil memperkuat posisinya di pasar global. *FLEGT* berfungsi sebagai alat penting dalam memastikan legalitas dan keberlanjutan produk kayu yang diekspor, serta mendukung Indonesia dalam mematuhi standar ketat Uni Eropa terkait perdagangan kayu. Temuan utama menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi Indonesia, bersama dengan *FLEGT* dan SVLK, telah membuka peluang ekspor yang lebih besar dan meningkatkan daya saing produk kayu Indonesia.

Ketiga faktor ini bekerja secara sinergis dalam mengatasi tantangan perdagangan kayu ilegal dan mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Diplomasi ekonomi Indonesia memainkan peran utama dalam memfasilitasi hubungan bilateral dengan Uni Eropa dan negara-negara mitra dagang, sementara *FLEGT* memberikan kerangka legal yang memastikan kayu Indonesia memenuhi standar keberlanjutan internasional. SVLK, sebagai sistem verifikasi legalitas kayu, mendukung upaya pemerintah dalam memastikan bahwa produk kayu Indonesia memenuhi persyaratan pasar global. Bersama-sama, ketiganya memperkuat pengelolaan hutan yang berkelanjutan, memerangi pembalakan liar, dan menciptakan pasar yang adil bagi produk kayu Indonesia.

Kebijakan ini tentunya memberikan dampak positif yang signifikan terhadap ekonomi Indonesia, terutama sektor kehutanan dan perdagangan internasional. Penerapan *FLEGT* dan SVLK meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor kehutanan, yang berdampak pada peningkatan ekspor kayu yang sah dan berkelanjutan. Hal ini juga membuka peluang ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja, serta memperbaiki posisi Indonesia di pasar Uni Eropa. Selain itu, kebijakan ini mendorong pengelolaan hutan yang lebih ramah lingkungan, yang berkontribusi pada penciptaan ekonomi hijau yang berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia perlu terus memperkuat diplomasi ekonomi dan mengoptimalkan implementasi *FLEGT* dan SVLK. Selain itu, langkah-langkah lebih lanjut untuk memperkuat pengawasan terhadap praktik perdagangan kayu ilegal dan meningkatkan kapasitas pengawasan di seluruh rantai pasokan kayu harus diperhatikan. Kolaborasi dengan sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional juga perlu ditingkatkan untuk memastikan keberlanjutan kebijakan ini.

Kerjasama internasional, khususnya dengan Uni Eropa, sangat penting dalam memastikan keberlanjutan pengelolaan hutan dan meningkatkan daya saing produk kayu Indonesia di pasar global. Melalui kerjasama yang erat dengan Uni Eropa dan negara-negara mitra lainnya, Indonesia dapat memperkuat implementasi *FLEGT*, memfasilitasi akses pasar yang lebih baik, dan terus memperkenalkan inovasi dalam sektor kehutanan untuk mendukung keberlanjutan industri kayu Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. *Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*. Retrieved January 12, 2025, from <https://www.kemendag.go.id>

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). *GIZ Indonesia*. Retrieved January 12, 2025, from <https://www.giz.de/en>

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *United Nations Office on Drugs and Crime*. Retrieved January 12, 2025, from <https://www.unodc.org/>

Environmental Investigation Agency (EIA). *Environmental Investigation Agency International*. Retrieved January 14, 2025, from <https://eia-international.org/>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. *Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia*. Retrieved January 15, 2025, from <https://www.menlhk.go.id>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. *Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK): Verifikasi Legalitas Kayu*. Retrieved January 15, 2025, from <https://silk.menlhk.go.id/index.php/info/vsvlk/3>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2023). *SVLK untuk pertumbuhan kayu legal dan lestari menuju pasar internasional*. Retrieved January 15, 2025, from <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6168/svlk-untuk-pertumbuhan-kayu-legal-dan-lestari-menuju-pasar-internasional>

FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). (2016). *The state of the world's forests 2016: Forests and agriculture: Land-use challenges and opportunities*. FAO. Retrieved January 14, 2025, from <http://www.fao.org/state-of-forests/en/>

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development). (2018). *Trade and development report 2018: Power, platforms, and the free trade delusion*. UNCTAD. Retrieved January 14, 2025, from <https://unctad.org/webflyer/trade-and-development-report-2018>

World Bank. (2019). *Sustainable forest management in Indonesia: Policy and practice*. World Bank. Retrieved January 14, 2025, from <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia>

Intermestic. [DIPLOMASI INDONESIA DALAM PERDAGANGAN KAYU KE UNI EROPA: STUDI KASUS PENUNDAAN IMPLEMENTASI LISENSI FLEGT]. *Intermestic: Journal of International Relations and Development*, Volume(6), page range. Retrieved January 2, 2025, from <https://intermestic.unpad.ac.id/index.php/intermestic/article/download/332/81/>

Forest Insights. (2023). *Nilai ekspor produk kayu melompat 7 persen, catat rekor baru sepanjang sejarah*. Retrieved January 31, 2025, from <https://forestinsights.id/nilai-ekspor-produk-kayu-melompat-7-persen-catat-rekor-baru-sepanjang-sejarah/>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2021). *Sektor usaha kehutanan berperan penting tingkatkan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja*. Retrieved January 31, 2025, from <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6208/sektor-usaha-kehutanan-berperan-penting-tingkatkan-ekonomi-dan-penciptaan-lapangan-kerja>

Forest Insights. (2023). *Potret industri pengolahan hasil hutan: Nilai investasi, penyerapan tenaga kerja, dan penerapan prinsip kelestarian*. Retrieved January 31, 2025, from <https://forestinsights.id/potret-industri-pengolahan-hasil-hutan-nilai-investasi-penyerapan-tenaga-kerja-dan-penerapan-prinsip-kelestarian/>